



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## KENDALA IMPLEMENTASI HILIRISASI BATU BARA

**Niken Paramita Purwanto**

Analisis Legislatif Ahli Muda

*niken.paramita@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Pengembangan batu bara ke bentuk yang lebih maju (bernilai tambah), seperti gasifikasi batu bara menjadi *dimetil eter* (DME), masih mengalami kendala karena dianggap belum memberikan keuntungan ekonomis yang memadai, terutama dengan harga batu bara yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir saat dijual mentah sebagai sumber energi utama. Dalam implementasi kebijakan hilirisasi, penting adanya kepastian hukum dan rencana perubahan energi sebagai faktor kunci untuk mendorong capaian hilirisasi. Harapan tersebut muncul ketika Presiden Joko Widodo menghadiri peresmian *groundbreaking* proyek DME pertama di Sumatra Selatan pada 24 Januari 2022, yang melibatkan kerja sama antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero), dan perusahaan Amerika Serikat, Air Products. Namun, pada awal tahun 2023, Air Products keluar dari proyek tersebut dan hingga saat ini belum ada penggantinya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, menyatakan bahwa batu bara Indonesia cenderung dijual dalam bentuk mentah dan peningkatan permintaan belakangan ini telah meningkatkan harga batu bara secara signifikan. Dalam situasi seperti ini, banyak yang mempertanyakan apakah perlu ada proses pengolahan tambahan jika penjualan batu bara mentah saja sudah berhasil. Selain itu, kepastian pasar domestik dalam menyerap produk DME juga belum terjamin, meskipun dianggap potensial sebagai pengganti LPG, namun masalah biaya menjadi fokus utama. Gasifikasi batu bara juga memerlukan investasi teknologi dan keuangan yang besar sehingga sampai saat ini upaya hilirisasi batu bara belum optimal. Belum terbentuknya ekosistem yang mendukung pengembangan DME juga menjadi kendala lainnya. Meskipun ada harapan untuk pengembangan DME dan produk hilirisasi batu bara lainnya, spekulasi dan pertimbangan yang tinggi masih menjadi isu utama. Kepastian hukum sangat penting dalam investasi ini. Bagi para pengusaha, keuntungan mungkin tidak segera didapat, tetapi yang terpenting adalah keamanan investasi ke depan. Meskipun ada insentif seperti royalti 0%, namun hingga saat ini belum menarik. Diperlukan juga sinergi hilirisasi batu bara untuk menghasilkan DME dengan kebijakan transisi energi yang jelas.

Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, menjelaskan bahwa rencana gasifikasi batu bara masih dalam penelitian karena nilai ekonomi harus menjadi pertimbangan utama. PTBA tetap mendukung program hilirisasi pemerintah, namun harus memperhitungkan dampaknya terhadap keuangan perusahaan. Teknologi untuk memproses batu bara ke bentuk yang bernilai tambah masih dalam tahap penelitian karena ada kendala seperti keluarnya perusahaan Air Products.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PTBA, pemegang saham menyetujui penggunaan 75% dari laba bersih tahun 2023 yang mencapai Rp4,6 triliun sebagai dividen. Selama tahun 2023, PTBA berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp38,5 triliun sehingga

laba bersihnya mencapai Rp6,1 triliun. Kinerja ini didukung oleh volume produksi pada tahun 2023 yang mencapai 41,9 juta ton, meningkat 13% dibandingkan dengan tahun 2022. Ke depan PTBA akan terus melakukan pengembangan-pengembangan untuk meningkatkan kinerja operasional dan penjualan. Berdasarkan rencana kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui, pada tahun 2024 target produksi PTBA akan tetap berada di kisaran 41 juta ton. Target produksi ini diharapkan meningkat menjadi sekitar 50 juta ton pada tahun 2025 dan hampir mencapai 60 juta ton pada tahun 2026.

## Atensi DPR

Hilirisasi batu bara seperti gasifikasi batu bara menjadi dimetil eter atau DME masih terkendala karena dianggap belum menguntungkan secara ekonomis. Hal ini disebabkan salah satunya karena harga batu bara mentah yang masih tinggi belakangan ini di pasar dunia. Kepastian hukum dan peta jalan transisi energi sangat penting dalam mengembangkan hilirisasi batu bara. DPR RI melalui Komisi VII perlu terus memantau berbagai aspek terkait hilirisasi batu bara, seperti kebijakan, regulasi, insentif, serta dukungan infrastruktur yang diperlukan. Pemerintah perlu menyusun dan mengevaluasi kembali regulasi terkait investasi, pengembangan teknologi, serta pemanfaatan sumber daya batu bara secara berkelanjutan. Komisi VII juga perlu terus mendorong pemerintah mempercepat hilirisasi batu bara untuk meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia serta mengurangi ketergantungan pada ekspor batu bara mentah.

## Sumber

bisnis.com, 4 Maret 2024;  
*Kompas*, 10 Mei 2024; dan  
kompas.com, 9 Mei 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka\_bkdprri

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

### Ekkuinbang

Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## EDITOR

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024